



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PADELIS NOBER.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130132190193.
Jabatan : Baintel Tim 3.2/E BKI-E.
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 1 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Sudirman, Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor: BP-02/A-02/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/79-45/IV/2023 tanggal 17 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/22/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/22/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/22/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu PADELIS NOBER NRP 21130132190193, Jabatan Baintel Tim 3.2/E BKI-E, Kesatuan Deninteldam XII/Tpr, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/145/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/179/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/208/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Dandeninteldam XII/Tpr memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Dandeninteldam XII/Tpr Nomor R/262/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Sertu PADELIS NOBER NRP 21130132190193 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 31 Mei 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Dandeninteldam XII/Tpr Nomor R/303/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Sertu PADELIS NOBER NRP 21130132190193 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 27 Juni 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
3. Surat Dandeninteldam XII/Tpr Nomor R/325/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Sertu PADELIS NOBER NRP 21130132190193

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dimintai dengan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 26 Juli 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Deninteldam XII/Tpr, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Padelis Nober (Terdakwa) adalah prajurit Deninteldam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Baintel Tim 3.2/E BKI-E, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu, NRP 21130132190193.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan cuti Natal dengan tujuan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Merakai Dusun Engkasari, Kel. Balai Debut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar, sesuai surat Izin Jalan Nomor B/SIJ/974/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf Tonggo Purba (Dan BKI-E) melakukan pengecekan anggota yang telah selesai melaksanakan cuti Natal di Safe House BKI-E Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Kemudian Dan BKI-E menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Dan BKI-E memerintahkan Serka Subur Wibowo (Saksi-1), Sertu Zainuddin (Saksi-2) mencari Terdakwa di sekitar Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng namun tidak diketahui keberadaannya sehingga Dan BKI-E melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Tri Purwanto (Dandeninteldam XII/Tpr) Pontianak yang selanjutnya memerintahkan seluruh anggota Deninteldam XII/Tpr melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pontianak dan dirumah orang tua Terdakwa di Kab. Sanggau Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

5. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, selanjutnya Dandeninteldam XII/Tpr memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2023/Idik tanggal 15 Februari 2023.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Februari 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 11 November 2020 karena bersalah melakukan tindak pidana Asusila dan telah selesai menjalani pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUBUR WIBOWO.**

Pangkat, NRP : Serka, 21100194251089.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 11 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Karet, Komplek Karet Indah 2 Blok CD Nomor C/23, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Subur Wibowo (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk disatuan Deninteldam XII/Tpr dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa melaksanakan Dinas Cuti Natal terhitung mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 dengan tujuan Jl. Merakai Dusun Engkasari, Kel. Balai Debut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar, pada saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa dibekali Surat Izin Jalan dengan Nomor B/SIJ/974/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Safe House BKI-E Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng telah dilaksanakan pengecekan personel yang telah selesai melaksanakan cuti natal yang diambil oleh Dan BKI-E a.n. Kapten Inf Tonggo Purba diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian Kapten Inf Tonggo Purba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa masih belum tiba di Safe House BKI-E Kota Palangka Raya sehingga Kapten Inf Tonggo Purba kembali menghubunginya melalui handphone namun tidak aktif, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Kapten Inf Tonggo Purba beserta anggota BKI-E melakukan pengecekan di wilayah Kota Palangka Raya serta menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat yang diduga menjadi persembunyian Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pontianak, menghubungi pihak keluarga Terdakwa di Kab. Sanggau, Prov. Kalbar dan di Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, namun tidak diketemukan juga, selanjutnya

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr guna proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan Saksi-1 dimintai keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 17 Februari 2023 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Banjar Baru, sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38- K/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 11 November 2020.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ZAINUDDIN.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150156341293.
Jabatan : Basintel Tim E. 1.3/BKI-E.
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 19 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Tanjungpura Permai No. 14 Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Zainuddin (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 pada saat Saksi-2 berdinis di Deninteldam XII/Tpr dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa melaksanakan dinas cuti Natal terhitung mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 dengan tujuan Jl. Merakai Dusun Engkasari, Kel. Balai Debut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov Kalbar.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Safe House BKI-E Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng telah dilaksanakan pengecekan personel yang telah selesai melaksanakan cuti Natal yang diambil oleh Dan BKI-E a n.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Kapten Inf Tonggo Purba mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian Kapten Inf Tonggo Purba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Terdakwa masih belum tiba di Safe House BKI-E Kota Palangka Raya sehingga Kapten Inf Tonggo Purba kembali menghubunginya melalui handphone namun tidak aktif, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 Kapten Inf Tonggo Purba beserta anggota BKI-E melakukan pengecekan di wilayah Kota Palangka Raya serta menghubungi orang tua Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat yang diduga menjadi persembunyian Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pontianak, menghubungi pihak keluarga Terdakwa di Kab. Sanggau, Prov. Kalbar dan di Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, namun tidak diketemukan juga, selanjutnya satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tprguna proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan Saksi-2 dimintai keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 17 Februari 2023 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Banjar Baru, sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 11 November 2020.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu PADELIS NOBER NRP 21130132190193, Jabatan Baintel Tim 3.2/E BKI-E, Kesatuan Deninteldam XII/Tpr, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidak hadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 6 Januari 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Padelis Nober (Terdakwa) adalah prajurit Deninteldam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Baintel Tim 3.2/E BKI-E, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu, NRP 21130132190193.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan cuti Natal dengan tujuan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Merakai Dusun Engkasari, Kel. Balai Debut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar, sesuai surat Izin Jalan Nomor B/SIJ/974/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf Tonggo Purba (Dan BKI-E) melakukan pengecekan anggota yang telah selesai melaksanakan cuti Natal di Safe House BKI-E Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dan BKI-E menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Dan BKI-E memerintahkan Serka Subur Wibowo (Saksi-1), Sertu Zainuddin (Saksi-2) mencari Terdakwa di sekitar Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng namun tidak diketahui keberadaannya sehingga Dan BKI-E melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023 (XII/Tpr) Pontianak yang selanjutnya memerintahkan seluruh anggota Deninteldam XII/Tpr melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pontianak dan di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Sanggau Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, selanjutnya Dandeninteldam XII/Tpr memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2023/Idik tanggal 15 Februari 2023.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Februari 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 11 November 2020 karena bersalah melakukan tindak pidana Asusila dan telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa baik dan buruknya, maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang bertugas di Deninteldam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Baintel Tim 3.2/E BKI-E, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Sertu NRP 21130132190193.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Deninteldam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Kapten Inf Tonggo Purba (Dan BKI-E) melakukan pengecekan anggota yang telah selesai melaksanakan cuti Natal di Safe House BKI-E Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Kemudian Dan BKI-E menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Dan BKI-E memerintahkan Serka Subur Wibowo (Saksi-1), Sertu Zainuddin (Saksi-2) mencari Terdakwa di sekitar Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng namun tidak diketahui keberadaannya sehingga Dan BKI-E melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Tri Purwanto (Dandeninteldam XII/Tpr) Pontianak yang selanjutnya memerintahkan seluruh anggota Deninteldam XII/Tpr melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pontianak dan di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Sanggau Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

c. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, selanjutnya Dandeninteldam XII/Tpr memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2023/Idik tanggal 15 Februari 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Februari 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan dikarenakan sampai dengan persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempitan untuk tetap berada di lingkungan TNI. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **Surat-surat:**

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu PADELIS NOBER NRP 21130132190193, Jabatan Baintel Tim 3.2/E BKI-E, Kesatuan Deninteldam XII/Tpr, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Padelis Nober**, Sertu NRP 21130132190193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- **Surat-surat:**

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Sertu **Padelis Nober** NRP 21130132190193, Jabatan Baintel Tim 3.2/E BKI-E, Kesatuan Deninteldam

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023



putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Sus NRP 524514, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H. Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/V/2023